**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan serta analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan di jurnal.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggaran sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

1. **Landasan Teori**

**1. Pajak**

**a. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

* 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

* 1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

* 1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

1. **Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2017:15-16), terdapat beberapa teori yang bertujuan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi asuransi sebagai bentuk pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya.

* 1. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat yang didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.

* 1. Teori Gaya Pikul

Teori ini berdasarkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya.

* 1. Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban mutlak karena negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan di pihak lain masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban tanda bakti terhadap negara.

* 1. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut waluyo (2017:16), terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:

* 1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

* 1. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

* 1. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

1. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Dalam hal cara pemungutan pajak, terdapat beberapa dasar pemungutan, yaitu terkait dengan *stelsel* pajak dan sistem pemungutan pajak.

* 1. *Stelsel* Pajak

Dalam Waluyo (2017:16-17), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

*(a). Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

*(b). Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu tahun

sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

*(c). Stelsel* campuran

Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7-8), adalah sebagai berikut:

* 1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menemukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
   1. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri

(b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

* 1. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

**2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

**a. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

“Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 4:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

**b. Pembukuan/Pencatatan Bagi Wajib Pajak**

Menurut Waluyo (2017:58) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta pernjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Sedangkan pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto.

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Wajib pajak yang menyenggalarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha /pekerjaan bebas dengan peredaran broto dalam setahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan sayarat memberitahukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

**c.Nomor Pokok Wajib Pajak**

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi sekaligus tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan wajib pajak tersebut akan menggunaka NPWP yang dimaksud.

Mardiasmo (2016:25), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Untuk dapat memperoleh NPWP, maka perlu untuk melewati persyaratan subjektif dan objektif.

Menurut Mardiasmo (2016:26), yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima penghasilan atau diwajibkan melaksanakan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

1. **Pengusaha kena pajak**

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dilaksanakan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) .Menurut Mardiasmo (2016:56), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
6. Jika diperiksa wajib ;
7. Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
8. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
9. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
10. **Pengertian Objek Pajak Penghasilan Orang pribadi Usahawan**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”  Dimana yang termasuk penghasilan adalah :   1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. surplus Bank Indonesia.   **f. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan orang pribadi Usahawan**  Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | | (1) | 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; | | (2) | warisan; | | (3) | harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; | | (4) | penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; | | (5). | pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; | | (6). | dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:   1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; | | (7). | iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; | | (8). | penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; | | (9). | bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; | | (10) | dihapus; | | (11) | penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:   1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; | | (12). | beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; | | (13). | sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan | | (14). | bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. | | |

**g. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat (1) menyatakan yang dimaksud subjek pajak adalah :

a. (1) orang pribadi

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. badan

c bentuk usaha tetap

**h. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 3 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan pengecualian subjek pajak adalah:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
   1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
   2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

**i. Tarif Pajak**

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto.Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

(1). Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

(2). Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% mempunyai batasan waktu.yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

* 1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

**3.** **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemendikbud.go.id), kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Artinya, kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan terhadap suatu perintah. Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah menaati aturan perpajakan. Menurut Amin Laili, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

(4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(5)Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

(a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;

* + - (b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

(c)Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

* 1. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

1. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
2. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud.

Dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Berdasarkan beberapa poin di atas, terdapat beberapa kriteria mengenai apakah Wajib Pajak patuh atau tidak. Melalui kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari pelaksanaan dalam penyampaian SPT, tidak memiliki permasalahan hukum di bidang perpajakan, dan kondisi bila adanya keterlambatan dalam melakukan penyampaian SPT atau terjadinya tunggakan dalam masa pajak.

**4. Pemahaman Tentang Pajak**

Pemahaman berasal dari kata paham, yang bearti seberapa banyaknya pengetahuan, mengerti, dan tahu mengenal sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman yaitu adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan mengartikan sesuatu dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan.

Menurut Widyantari, Wahyuni dan Sulindawati (2017:3) Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Menurut (Mardiasmo, 2016:1) Pajak memiliki beberapa unsur dalam memahami kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

1. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
2. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah berusaha mengupayakan dan menghimbau setiap wajib pajak untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik sebagai pemungut pajak maupun pemotong pajak tertentu agar wajib pajak dapat memahami secara menyeluruh kewajibannya terhadap suatu negara yang menjadi sebuah itikad baik bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**5. Motivasi Wajib Pajak**

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2007:252), Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak.

Terdapat dua kategori motivasi menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2007:253), yaitu :

1. Motivasi intrinsik, yaitu kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang sebagai pendorong seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku.
2. Motivasi eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mendorong seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku seperti misalnya gaji, kondisi tempat kerja, kebijakan organisasi, hubuungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan sebagainya.

Menurut Amir (2017:159), Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan.Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat.Dengan demikian, motif merupakan suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu terdapat tujuan tertentu. Pengertian motivasi seperti yang dikemukakan oleh Wexley & Yuki (1997:75) memberikan batasan mengenai motivasi sebagai “*The process by which behavior is* *energized and*

*directed.*” Pengertian tersebut berarti pemberian atau penimbulanmotif. Dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif, jadi motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan.

Menurut Sobur (2016:233), Motivasi merupakan istilah lebih umum yang menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Dari landasan teoritis yang telah dikemukakan, penulis merujuk kepada penelitian terdahulu dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Tabel 2.1** |
|  |  | **Penelitian Terdahulu** |
|  |  | |
| Nama Peneliti | Diani Widiastuti, Endang Siti Astuti dan Heru Susilo | |
| Tahun Penelitian | 2013 | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisai, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak | |
|  | terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha | |
|  | Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang | |
|  | Utara) | |
| Variabel Penelitian | 1. | Sosialisasi (X1) |
|  | 2. | Motivasi (X2) |
|  | 3. | Pemahaman Wajib Pajak (X3) |
|  | 4. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hasil Penelitian | 1. | Peran sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan |
|  |  | wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama |
|  |  | Malang Utara. |
|  | 2. | Peran motivasi dalam penelitian ini memiliki pengaruh |
|  |  | secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan |
|  |  | wajib pajak. |
|  | 3. | Pemahaman Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap |
|  |  | kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP |
|  |  | Pratama Malang Utara. |
|  |  | |
| Nama Peneliti | Adincha Ayusida Sulistiyono | |
| Tahun Penelitian | 2012 | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam | |
|  | Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan | |
| Variabel Penelitian | 1. | Motivasi dalam membayar pajak (X1) |
|  | 2. | Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran |
|  |  | pajak (Y) |
| Hasil Penelitian | Terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap | |
|  | kepatuhan membayar pajak, namun pengaruh tersebut masih | |
|  | lemah hanya sekitar 47,1%. | |
|  |  | |
| Nama Peneliti | Suyanto dan Ika Septiani Putri | |
| Tahun Penelitian | 2017 | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax | |
|  | Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar | |
|  | Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan | |
| Variabel Penelitian | 1. | Persepsi wajib pajak tentang Tax Amnesty (pengampuan |
|  |  | pajak) (X1) |
|  | 2. | Motivasi membayar pajak (X2) |
|  | 3. | Kepatuhan perpajakan (Y) |
| Hasil Penelitian | 1. | Persepsi wajib pajak tentang kebijakan Tax Amnesty |
|  |  | tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan |
|  |  | terhadap kepatuhan perpajakan |
|  | 2. | Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan |
|  |  | signifikan terhadap kepatuhan perpajakan |
|  |  | |
| Nama Peneliti | Riris Rotua Sitorus dan Intan Fauziyati | |
| Tahun Penelitian | 2016 | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak | |
|  | terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran | |
|  | Wajib Pajak sebagai Variable Intervening | |
| Variabel Penelitian | 1. | Lingkunngan kerja (X1) |
|  | 2. | Motivasi wajib pajak (X2) |
|  | 3. | Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasil Penelitian | 1. | Lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang tidak | |
|  |  | signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak | |
|  | 2. | Motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang searah | |
|  |  | dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib  pajak | |
|  |  | |  |
| Nama Peneliti | Sri Putri Tita Mutia | | |
| Tahun Penelitian | 2014 | | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, | | |
|  | Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap | | |
|  | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | | |
| Variabel Penelitian | 1. | Sanksi Perpajakan (X1) | |
|  | 2. | Kesadaran Perpajakan (X2) | |
|  | 3. | Pelayana Fiskus (X3) | |
|  | 4. | Tingkat Pemahaman (X4) | |
|  | 5. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | |
| Hasil Penelitian | Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi | | |
|  | perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan | | |
|  | tingkat pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak | | |

**C.** **Kerangka Pemikiran**

Demi menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, terdapat hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman tentang pajak dan motivasi membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara di sektor perpajakan untuk pembagunan Negara yang lebih baik lagi.

**1. Pengaruh Pemahaman Tentang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman merupakan seberapa besar seorang individu dapat mengetahui dan memahami. Pemahaman juga merupakan untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Pemahaman digunakan agar mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, mengerjakan, dan menjadikan pembelajaran bagi setiap wajib pajak dalam hal perpajakan.

Pemahaman yang utuh diwajibkan oleh setiap wajib pajak yang akan berhubungan langsung dengan peraturan perpajakan, dimana terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang mengenai perpajakan lainnya. Pemahaman bisa dibentuk oleh pengetahuan yang cukup, pembelajaran setiap metode perpajakan, atau dengan sosialisasi dengan banyak relasi mengenai perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengetahui atau memiliki pemahaman yang cukup akan berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan pemahaman yang minim, wajib pajak cenderung akan tidak terlalu memperhatikan fungsi dari perpajakan itu sendiri dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tetapi sebaliknya jika setiap wajib pajak memliki pengetahuan yang cukup untuk perpajakan dan sosialisasi dalam membayar pajak, maka akan tinggi kemungkinan para wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mengingkatkan kesejahteraan Negara dengan berkontribusi dalam hal perpajakan dengan cara membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan Negara.

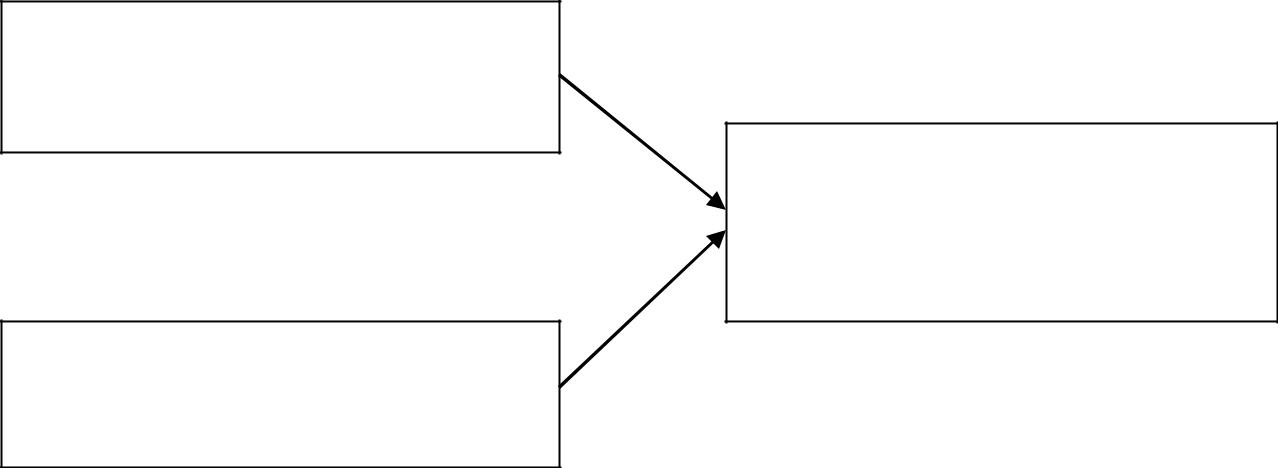
Menurut penelitian Mutia (2014) menunjukkan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Widiastuti, Astuti dan Susilo (2013) menunjukkan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**2. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi wajib pajak diakui apabila wajib pajak bersedia secara sukarela untuk kemajuan Negaranya dengan mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar pajak sesuai dengn peraturan perpajakan. Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi setiap wajib pajak dalam memenuhi kebijakan dalam perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki motivasi dari dalam diri wajib pajak, maka kepatuhan setiap wajib pajak akan menurun. Menurut penelitian Suyanto (2017:54) menunjukan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga semakin meningkat. Menurut penelitian sulistiyono (2012) menunjukan motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Gambar 2.1**

**Gambar Kerangka Pemikiran**



Pemahaman tentang pajak

(X1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Usahawan

(Y)

Motivasi Membayar Pajak

(X2)

**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

Ha1 :Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Ha2 :Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.